

**DOKUMEN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan berdasarkan peraturan tersebut, Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2026.

Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tembilahan, Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	62
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB V PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, sesuai surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026 penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Pedoman penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah diberlakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai

tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Tahunan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021, dibentuklah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal

pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian
29. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

30. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
31. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
35. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
36. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
37. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

38. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
39. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan arah kebijakan umum pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- untuk memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan Perangkat Daerah;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perangkat Daerah;
- Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah; dan
- Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan tata cara menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok, fungsi, norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK),

Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Lampirkan Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,

- Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidan pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, yang mana merupakan tahun pertama Renstra 2024 s/d 2026, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Staitsitk Kabupaten Indragiri Hilir dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik Dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	100	10.167.231.000			100	19.503.875.070	9	3.149.422.821	14	5.150.347.674	4	4.139.088.400	22	3.100.844.900	49	15.539.703.795	49	15.539.703.795	49	100,00
		2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan (Dengan Satuan:Persen)	100	10.167.231.000			100	19.503.875.070	9	3.149.422.821	14	5.150.347.674	4	4.139.088.400	22	3.100.844.900	49	15.539.703.795	49	15.539.703.795	49	100,00
		2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	197	13.403.000			197	4.987.328	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 6 + 12)	(14=13/5 x100)						
		2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	20	26.013.000		20	5.040.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	5	620.279.000		8	1.600.000.000	-	286.000.000	-	332.375.000	0	121.000.000	7	309.820.000	7	1.049.195.000	7	1.049.195.000	100	100,00	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	80	8.234.984.000		75	17.461.853.000	20	2.850.736.821	20	4.754.517.674	25	4.009.744.400	10	2.691.766.000	75	14.306.764.895	75	14.306.764.895	94	100,00	
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	318.110.000		1	149.999.000	0	12.686.000	-	21.760.000	0	8.344.000	1	23.262.900	1	66.052.900	1	66.052.900	100	20,76	
		2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan:Dokumen)	20	146.083.000		1	19.980.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)	
		2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50	96.054.000			10	12.000.250	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2	402.167.000			2	150.021.900	1	-	2	41.695.000	0	-	0	75.996.000	2	117.691.000	2	117.691.000	75	29,26
		2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27	310.138.000			5	99.993.592	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	100	1.358.670.000			74	2.434.493.768	11	163.309.280	22	180.322.781	-	74.170.500	67	226.962.974	100	644.765.535	100	644.765.535	100	47,46

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)		
(1)	(2)	(3)	(4)	100	3.869.976.000			50		-	262.523.226	-	228.327.100	-	315.737.500	45	355.941.696	45	1.162.529.522	45	1.162.529.522	45	30,04	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pmda yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	100	1.358.670.000			100	612.999.887	11	163.309.280	22	180.322.781	0	74.170.500	67	226.962.974	100	644.765.535	100	644.765.535	100	47,46
		2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Domain)	10	155.068.000			3	50.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 6 + 12)	(14 = 13/5 x100)					
		2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	5	373.181.000		3	363.000.044	1	130.383.168	2	161.027.781	0	60.287.500	0	103.517.145	3	455.215.594	3	455.215.594	60	100,00
		2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	54	830.421.000		17	199.999.843	-	32.926.112	-	19.295.000	0	13.883.000	34	123.445.829	34	189.549.941	34	189.549.941	63	22,83
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	90	3.869.976.000		90	1.821.493.881	2	262.523.226	-	228.327.100	0	315.737.500	45	355.941.696	47	1.162.529.522	47	1.162.529.522	52	30,04
		2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	134.054.000		1	50.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)
		2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengolahan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengolahan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	3	114.054.000		1	30.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Dengan Satuan:Unit)	2	134.054.000		2	50.000.000	-	12.851.000	-	23.990.000	0	500.000	2	25.950.000	2	63.291.000	2	63.291.000	100	47,21
		2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.922.054.000		1	1.081.493.975	-	171.965.139	-	104.993.100	0	295.519.500	1	274.794.296	1	847.272.035	1	847.272.035	100	44,08
		2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	3	135.068.000		2	30.000.000	-	5.490.908	-	6.890.000	0	-	2	4.800.000	2	17.180.908	2	17.180.908	67	12,72
		2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	3	260.138.000		2	50.000.000	-	500.000	-	25.400.000	0	-	2	11.840.000	2	37.740.000	2	37.740.000	67	14,51

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)
		2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dengan Satuan:Dokumen)	5	155.068.000		5	250.000.000	1	47.873.668	-	24.411.000	0	19.718.000	0	22.397.400	1	114.400.068	1	114.400.068	20	73,77
		2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	612.308.000		1	149.999.906	-	10.002.511	-	12.305.000	0	-	0	-	-	22.307.511	-	22.307.511	-	3,64
		2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Dengan Satuan:Dokumen)	9	135.068.000		2	30.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dengan Satuan:Dokumen)	2	268.110.000		1	100.000.000	-	13.840.000	-	30.338.000	0	-	1	16.160.000	1	60.338.000	1	60.338.000	50	22,50

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			(11)		(12)		(13 = 6 + 12)	
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	1.045.727.000		100	394.299.000	100	53.936.000	-	35.902.000	25	51.980.500	25	26.641.000	100	168.459.500	100	168.459.500	100	16,11
		2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)	100	1.045.727.000		100	394.299.000	100	53.936.000	-	35.902.000	25	51.980.500	25	26.641.000	100	168.459.500	100	168.459.500	100	16,11
		2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	1	664.578.000		1	242.259.000	-	9.936.000	-	33.862.000	0	12.061.000	1	26.641.000	1	82.500.000	1	82.500.000	100	12,41
		2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Dengan Satuan:Orang)	60	113.041.000		5	50.000.000	-	-	-	-	5	39.919.500	0	-	5	39.919.500	5	39.919.500	8	35,31

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			(11)		(12)		(13 = 6 + 12)	
		2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	300	134.054.000		25	50.000.000	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
		2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Dengan Satuan:Unit)	9	134.054.000		1	52.040.000	4	44.000.000	-	2.040.000	0	0	-	4	46.040.000	4	46.040.000	44	34,34	
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	1.187.404.000		37	447.719.000	-	11.420.000	6	66.696.000	1	18.339.000	2	115.668.520	9	212.123.520	9	212.123.520	9	17,86
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian (Dengan Satuan:Persen)	100	1.135.378.000		100	437.719.000	-	11.420.000	35	66.696.000	5	18.339.000	10	115.668.520	50	212.123.520	50	212.123.520	50	18,68

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13 = 6 + 12)	(14=13/5 x100)				
		2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	35.216.000		1	10.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	3	52.026.000		1	10.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	777.998.000		1	357.719.000	-	10.320.000	1	37.473.500	0	14.746.500	87.075.520	1	149.615.520	1	149.615.520	100	19,23	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	35	270.138.000			5	60.000.000	-	1.100.000	2	29.222.500	1	3.592.500	2	28.593.000	5	62.508.000	5	62.508.000	14	23,14
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi (Dengan Satuan:Persen)	100	52.026.000			100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	34	52.026.000			1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	17.033.543.000			100	6.999.440.231	38	1.172.498.974	28	1.727.206.481	32	1.243.474.466	45	1.428.638.755	59	5.571.818.676	59	5.571.818.676	59	32,71
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	252.093.000			100	245.957.020	22	47.871.900	-	14.664.000	0	8.593.500	47	24.866.850	69	95.996.250	69	95.996.250	69	38,08
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	134.054.000			6	153.978.070	1	45.939.000	-	14.086.500	0	600.000	1	19.380.000	2	80.005.500	2	80.005.500	67	59,68
		2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	72.026.000			4	52.359.070	2	1.932.900	-	577.500	0	1.913.500	1	106.850	3	4.530.750	3	4.530.750	75	6,29

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 6 + 12)	(14 = 13/5 x 100)					
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	46.013.000		2	39.619.880	-	-	-	-	0	6.080.000	2	5.380.000	2	11.460.000	2	11.460.000	100	24,91
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	100	13.114.279.000		100	4.083.143.000	33	630.827.365	31	1.160.961.629	30	717.647.901	63	780.501.916	63	3.289.938.811	63	3.289.938.811	63	25,09
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	13.100.424.000		30	4.074.909.000	30	629.327.365	28	1.158.961.629	27	717.147.901	27	776.267.916	27	3.281.704.811	27	3.281.704.811	90	25,05
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.554.000		1	1.200.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11.301.000		1	7.034.000	-	1.500.000	-	2.000.000	0	500.000	1	4.234.000	1	8.234.000	1	8.234.000	100	72,86

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)			
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp		
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13 = 6 + 12)	(14 = 13/5 x 100)				
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	100	53.961.400		100	36.794.400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	53.961.400		1	36.794.400	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	100	108.039.000		100	45.850.000	-	-	33	4.500.000	0	4.350.000	17	4.500.000	50	13.350.000	50	13.350.000	50	12,36
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	30	46.013.000		25	25.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	3	62.026.000		3	20.850.000	-	-	2	4.500.000	0	4.350.000	1	4.500.000	3	13.350.000	3	13.350.000	100	21,52
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	1.257.922.600		100	735.729.171	31	78.935.602	30	142.045.350	44	103.930.380	68	206.388.414	88	531.299.746	88	531.299.746	100	42,24

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)				
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	13.403.000			1	4.999.965	-	2.000.000	-	2.000.000	0	-	1	990.000	1	4.990.000	1	4.990.000	100	37,23
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	360.138.000			2	199.998.306	-	-	-	84.901.250	1	57.224.000	1	79.780.000	2	221.905.250	2	221.905.250	100	61,62
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	31.013.000			1	9.999.900	1	1.283.800	1	1.829.100	1	1.242.200	1	5.608.500	1	9.963.600	1	9.963.600	100	32,13
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	163.041.000			2	99.040.000	-	14.420.790	-	25.410.000	1	19.620.180	1	35.825.000	2	95.275.970	2	95.275.970	100	58,44
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	57.026.000			1	15.000.000	1	4.095.000	1	4.300.000	1	1.000.000	1	5.500.000	1	14.895.000	1	14.895.000	100	26,12

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)		
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	250	39.013.000			250	18.000.000	40	2.700.000	13	2.700.000	9	900.000	188	11.700.000	250	18.000.000	250	18.000.000	100	46,14
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	75	594.288.600			82	388.691.000	3	54.436.012	3	20.905.000	3	23.944.000	3	66.984.914	12	166.269.926	12	166.269.926	16	27,98
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	767.442.000			100	124.056.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	418.250.000			2	71.376.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
		2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	250.138.000			1	38.780.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp		K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)
		2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	99.054.000		1	13.900.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	1.217.700.000		100	1.618.164.240	100	396.719.407	100	401.755.502	100	399.902.185	100	403.749.176	100	1.602.126.270	100	1.602.126.270	100	100,00
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.299.000		1	1.200.000	1	300.000	1	300.000	1	100.000	1	500.000	1	1.200.000	1	1.200.000	100	36,37
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	202.399.000		2	216.000.000	2	39.429.007	2	43.415.104	2	42.760.785	2	44.238.676	2	169.843.572	2	169.843.572	100	83,92
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.012.002.000		1	1.400.964.240	1	356.990.400	1	358.040.398	1	357.041.400	1	359.010.500	1	1.431.082.698	1	1.431.082.698	100	100,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)	
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	262.106.000			100	109.746.400	121	18.144.700	33	3.280.000	83,3	9.050.500	63	8.632.399	100	39.107.599	100	39.107.599	100	14,92
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	33.013.000			2	11.705.200	1	5.705.200	-	-	0	-	1	3.315.483	2	9.020.683	2	9.020.683	100	27,32
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	62.026.000			3	19.739.200	0	5.000.000	-	-	0	-	1	1.296.916	1	6.296.916	1	6.296.916	33	10,15
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	134.054.000			1	59.292.000	-	-	-	1.780.000	1	3.000.000	0	0	1	4.780.000	1	4.780.000	100	3,57

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13 = 6 + 12)		(14=13/5 x100)		
(1)	(2)	2.16.01.2.09.0011	(3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(4) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	33.013.000			3	19.010.000	13	7.439.500	4	1.500.000	7	6.050.500	5	4.020.000	29	19.010.000	29	19.010.000	100	57,58
Rata-rata capaian kinerja (%)										32	4.813.110.301	14	7.388.802.036	12	5.842.790.366	32	5.254.697.845	63	23.299.400.548					
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Adanya kerjasama yang baik antara pihak pelaksana dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Semangat dan Etos Kerja																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Karena menggunakan sistem elektronik dalam proses pengadaan waktu dalam proses penyelesaian memakan waktu yang lama, Karena menggunakan sistem elektronik dalam proses pengadaan waktu dalam proses penyelesaian memakan waktu yang lama, SDM ASN yang memiliki latar belakang IT untuk Pengamanan Informasi Tidak Ada, Tidak ada Sarana, Prasarana dan Peralatan Pendukung dan Penunjang Kerja Persandian, kurang ditunjang dengan anggaran, Regulasi dan SOP tidak ada, Kurangnya kesadaran terhadap penting nya data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah Kab. Inhil																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)			Melakukan Koordinasi lebih lanjut demi tercapainya target dikerja dengan maksimal, Membuat Perbup dan Kelengkapan lainnya, Normalisasi waktu dalam pengantaran dokumen, maksimalisasi capaian kinerja triwulan berikutnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):			Terjalinnnya Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pihak terkait, untuk meningkatkan persentase angka realisasi pelaksanaan akan dilakukan kembali evaluasi dan kinerja demi mecapai target yang diinginkan, Membuat perencanaan kerja, membuat regulasi/SOP, Evaluasi pejabat perangkat daerah terhadap data statistik sektoral																					

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas bahwa capaian program dan kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang Direncanakan, yaitu:
 - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - b. Program Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - b. Program Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu:
- Koordinasi yang kurang baik dan maksimal dalam permintaan data
 - Kurangnya staf ASN, terbatasnya SDM IT
 - Tebatasnya operasional pendukung kinerja kegiatan
 - Ketidaksesuaian antara target Renja dengan target DPA menyebabkan tidak tercapainya target kinerja
 - Karena menggunakan sistem elektronik dalam proses pengadaan waktu dalam proses penyelesaian memakan waktu yang lama
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD antara lain:
- Adanya program/kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan karna ketidaksesuaian target kinerja
 - Kurang maksimalnya data dalam pencapaian program Renstra PD
 - Terbatasnya kinerja OPD dalam memecahkan permasalahan
 - Pekerjaan jadi kurang efektif karna operasional pendukung kinerja kegiatan terbatas
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- Membuat regulasi / SOP setiap tahunnya
 - Membuat Perencanaan kerja yang baik salah satunya dengan merencanakan dan memperhitungkan target kinerja dengan optimal
 - Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.
 - Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- Mengoptimalkan peran kontrol internal agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun *stakeholders* dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui
- Terpenuhinya SDM IT
- Terpenuhinya operasional penunjang kinerja kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika Persandian dan Statistik yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan OPD, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil

saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja OPD kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*), karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024-2026, maka secara rinci indikator kinerja dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE (INDIKATOR TUJUAN)			2,09	3,0	2,30	2,50	3,00	2,23		2,50	3,00	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (INDIKATOR SASARAN)			-	-	100	100	100	-		100	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (INDIKATOR SASARAN)			-	-	50	75	100	-		75	100	
4	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi (INDIKATOR SASARAN)			-	-	100	100	100	-		100	100	
5	Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah (INDIKATOR SASARAN)			-	-	37	74	100	-		74	100	
6	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			23	24	20	20,5	21	-		20,5	21	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kab.Inhil atas Komponen Pengungkit (INDIKATOR TUJUAN)												
7	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil (INDIKATOR SASARAN)			65	70	BB	BB	BB	n/a		BB	BB	
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	-	-	3	3	3	3		3	3	
9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	-	-	27	41	54	36		41	54	
10	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab. Inhil		√	-	-	566.66 3	623.33 0	685.66 3	521.67 8		623.33 0	685.66 3	
11	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√	-	-	0	34	34	34		34	34	
12	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√	-	-	34	34	34	34		34	34	
12	Tingkat keamanan informasi pemerintah		√	-	-	238	477	645	-		477	645	

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja di ambil dari Bab IV Tujuan/Sasaran dan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dokumen Renstra Tahun 2024 s/d 2026 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang mana ada Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci PD (IKK) .

Pergantian pada Renstra 2018-2023 menjadi Renstra 2024-2026 dan adanya perubahan pada Indikator Tujuan/Sasaran menyebabkan target dan realisasi tercatat 0 di tahun 2022 dan 2023 dan akan dimulai pada Tahun 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan kondisi masa yang akan datang. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting.

Berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas. Identifikasi permasalahan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 sebagai berikut:

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) serta kelompok tenaga IT yang tersedia baik di kabupaten maupun kecamatan 2. Sebagian besar penduduk indragiri hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi 3. Masyarakat dan perangkat daerah di kabupaten indragiri hilir belum sepenuhnya memahami dengan maksimal era keterbukaan informasi public 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya infrastruktur dan layanan aplikasi bidang komunikasi dan informasi hingga ke kecamatan dan desa 2. Masih kurangnya sumber daya yang handal dan professional 3. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE 4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi. 5. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. 6. Belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah. 7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi.
2	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menyampaikan data di Inhil Satu Data Merdeka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional dalam Bidang Statistik 2. Kurangnya Pemahaman OPD terhadap pentingnya Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan
3	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian 2. Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi (sandiman) akibatnya regenerasi SDM Sandiman kurang berjalan dengan baik dan minat menjadi SDM sandi yang kurang. 2. Terbatasnya kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan).

Berikut disampaikan isu strategis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

- Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City

Penerapan SPBE dapat mendukung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan Smart City. penerapan SPBE dapat menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif untuk menerapkan konsep Smart City dalam membangun kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep Smart City juga menempatkan data dan teknologi sebagai inti dari pengambilan keputusan dan manajemen kota. Oleh karena itu, penerapan SPBE yang memanfaatkan teknologi untuk untuk mengumpulkan dan menganalisis data bangunan dan lingkungan hidup sangat sesuai dengan konsep Smart City.

- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

- **Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274, 391 dan 394, bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan secara teknis diatur di dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- **Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE**

Pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

- Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi. Pemerintah dan badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Terdapat batasan dalam keterbukaan informasi, seperti informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum. Keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur lebih lanjut tentang keterbukaan informasi.

- *Information Technology for Society*

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan Teknologi informasi telah membawa pengaruh besar, teknologi memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, teknologi dapat dimanfaatkan ke dalam berbagai bidang, yakni Pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi, bidang pangan, bidang komunikasi dan informasi, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Agar seluruh masyarakat bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan hal ini.

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi.
- 2) Menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat.

- 3) Membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat.
- 4) Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
- 5) Melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana teknologi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir akan

memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama.

Pagu yang terdapat dalam Rancangan Renstra pada Tahun 2026 sebesar **Rp.10.996.740.000,-** sebagaimana Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	5.820.260.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	5.820.260.000,00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen	69.335.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 Persen	69.335.000,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.620.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.620.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.810.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.810.000,00	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.905.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.905.000,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	4.668.688.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	4.668.688.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.665.363.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.665.363.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	355.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	355.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.970.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.970.000,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	100 Persen	7.526.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	100 Persen	7.526.000,00	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.526.000,00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.526.000,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	29.715.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	29.715.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	9.905.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	9.905.000,00	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	19.810.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	19.810.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	291.211.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	291.211.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.961.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.961.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.052.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.052.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.905.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.905.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.715.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.715.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.810.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.810.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	250 Dokumen	9.905.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	250 Dokumen	9.905.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	118.863.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	118.863.000,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100 Persen	316.966.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100 Persen	316.966.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	178.294.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	178.294.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	99.052.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	99.052.000,00	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	39.620.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	39.620.000,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	357.579.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	357.579.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	989.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	989.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	59.431.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	59.431.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	297.159.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	297.159.000,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	79.240.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	79.240.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	9.905.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	9.905.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.810.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	19.810.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.620.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.620.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.905.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.905.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 %	2.985.450.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 %	2.985.450.000,00	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	100 Persen	2.985.450.000,00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	100 Persen	2.985.450.000,00	
Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	2.377.272.000,00	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	2.377.272.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	118.863.000,00	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	118.863.000,00	
Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0 Laporan	0,00	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0 Laporan	0,00	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	79.241.000,00	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	79.241.000,00	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	10.000.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	10.000.000,00	
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	9.905.000,00	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	9.905.000,00	
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	59.431.000,00	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	59.431.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	99.052.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	99.052.000,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	3.961.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	3.961.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	188.105.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	188.105.000,00	
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	39.620.000,00	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	39.620.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	-	1.535.307.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	-	1.535.307.000,00	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola	100 Persen	128.768.000,00	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola	100 Persen	128.768.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	5 Dokumen	128.768.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	5 Dokumen	128.768.000,00	
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Persen	1.406.539.000,00	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90 Persen	1.406.539.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	50.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	79.241.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	79.241.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	18 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	18 Perangkat Daerah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	20.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	20.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	30.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	98.246.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	98.246.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0 Laporan	0,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	0 Laporan	0,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	99.052.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	99.052.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Laporan	0,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Laporan	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	54 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	54 Perangkat Daerah	500.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	150.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	150.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100 %	307.060.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100 %	307.060.000,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 Persen	307.060.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 Persen	307.060.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	50.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	3 Orang	50.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	3 Orang	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	50.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	57.060.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	57.060.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	100 %	348.663.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	100 %	348.663.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	245.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100 Persen	245.000.000,00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	110.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	110.000.000,00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	35.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	35.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	10 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	10 Perangkat Daerah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	0,00	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	0,00	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	100 Persen	103.663.000,00	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	100 Persen	103.663.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	103.663.000,00	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	103.663.000,00	
				10.996.740.000,00					10.996.740.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pada saat perintah pelaksanaan penginputan Renja melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana terlebih dahulu dilakukan verifikasi usulan masyarakat yang diusulkan oleh perangkat desa atau kelurahan dan diverifikasi lewat akun Esselon IV OPD. Ketika dipantau setiap harinya lewat akun Esselon IV terdapat banyak usulan yang diusulkan oleh Kecamatan/Desa. Akan tetapi semua usulan yang sampaikan tidak sesuai dengan tupoksi dan wewenang Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan semua Desa mengusulkan permintaan pembangunan tower. Maka dari itu, usulan tersebut tidak bisa diterima oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi akan diteruskan ke Kementrian untuk di

usulkan dengan catatan Desa yang bersangkutan melengkapi persyaratan untuk pembangunan tower.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Indragiri Hilir
Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada Tahun 2026 tetap berfokus pada implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang merupakan arah pembangunan tahap keempat dalam pencapaian Visi Indonesia 2045. Adapun prioritas pembangunan nasional mencakup:

- 1) Penguatan Infrastruktur Digital Nasional yaitu Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas jaringan internet dan digitalisasi di seluruh wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini untuk mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan literasi digital masyarakat.
- 2) Pemerintah menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Transformasi ini sejalan dengan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital yaitu Dalam RPJMN, pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas untuk mendukung Indonesia menghadapi tantangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi informasi akan diperluas, dengan fokus pada tenaga kerja lokal.
- 4) Keamanan Siber dan Tata Kelola Data Nasional yaitu Peningkatan keamanan siber menjadi perhatian utama untuk melindungi infrastruktur digital nasional dari ancaman cybercrime. Selain itu, kebijakan perlindungan data pribadi mulai diimplementasikan lebih intensif sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kemenkominfo

Sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2025-2029, beberapa prioritas kebijakan yang relevan untuk diimplementasikan di tingkat daerah,

khususnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Indragiri Hilir, meliputi:

- 1) Pembangunan Ekosistem Digital yaitu Kemenkominfo mendorong penguatan ekosistem digital dengan fokus pada transformasi digital di sektor publik, pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Hal ini menuntut peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet dan perangkat teknologi di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital yaitu Kebijakan ini menekankan pada percepatan penerapan SPBE di pemerintah pusat maupun daerah. Dinas Kominfo perlu memprioritaskan pengembangan aplikasi layanan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 3) Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber : Implementasi UU PDP menjadi prioritas utama, sehingga diperlukan penguatan tata kelola data di tingkat daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas dan sistem pengamanan siber untuk melindungi data pemerintahan dan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
- 4) Pengembangan Smart City di Daerah dalam rangka mendukung inisiatif Smart City, Kemenkominfo mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi dalam perencanaan kota, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
- 5) Literasi digital menjadi salah satu fokus utama Kemenkominfo untuk mengurangi kesenjangan digital. Program edukasi dan pelatihan masyarakat di bidang teknologi harus menjadi salah satu kegiatan strategis Dinas Kominfo pada Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Tujuan dan Sasaran Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-		
				2024	2025	2026
Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Indeks	2.30	2.50	3.00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik Dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	50	75	100
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	37	74	100

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan

ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Untuk itu pada pembahasan bab 3.3 ini akan dijelaskan apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika ada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD yakni sebagai berikut:

a. Faktor yang menjadi Pertimbangan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
- Mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;

b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Rensta Tahun 2024-2026 berjumlah sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan yang masing-masing kegiatan lokasinya ditujukan dan fokus terhadap Kota Tembilahan, Indragiri Hilir dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu sebesar Rp. 5.820.260.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 69.335.000,-

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.668.688.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 7.526.000,-
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp.29.715.000,-
 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.291.211.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.316.966.000,-
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 357.579.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp.79.240.000,-
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki pagu sebesar Rp.2.985.450.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.2.985.450.000,-
 - Sub Kegiatan Relasi Media
 - Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

- Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyusunan Konten
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- 3) Program Aplikasi Informatika memiliki pagu sebesar Rp.1.535.307.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.128.768.000,-
 - Sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.1.406.539.000,-
 - Sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

- Sub kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 - Sub kegiatan Penyediaan Akses Internet
 - Sub kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - Sub kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki pagu sebesar Rp.307.060.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.307.060.000,-
 - Sub kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 - Sub kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Sub kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki pagu sebesar Rp.348.663.000,- dengan kegiatan dan sub kegiatannya yakni:

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.245.000.000,-
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
 - Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kotadengan pagu sebesar Rp.103.663.000,-
 - Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK										11.348.686.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										11.348.686.000,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										10.494.858.000,00			
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-			100 %	5.820.260.000,00				-	5.880.640.000,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	69.335.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	129.715.000,00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	39.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		100.000.000,00
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	19.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		19.810.000,00
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	4.668.688.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	4.668.688.000,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.665.363.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		4.665.363.000,00
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	355.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		355.000,00
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.970.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		2.970.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara	-			100 Persen	7.526.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	7.526.000,00	
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.526.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		7.526.000,00	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik	-			100 Persen	29.715.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	29.715.000,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	19.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		19.810.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	-			100 Persen	291.211.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	291.211.000,00
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.961.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		3.961.000,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	99.052.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		99.052.000,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.715.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		29.715.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															kinerja					
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		19.810.000,00	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				250 Dokumen	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	118.863.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		118.863.000,00	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	-			100 Persen	316.966.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	316.966.000,00	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	178.294.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		178.294.000,00
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	99.052.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		99.052.000,00
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	39.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		39.620.000,00
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	-			100 Persen	357.579.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	357.579.000,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	989.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		989.000,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	59.431.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		59.431.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	297.159.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		297.159.000,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	-			100 Persen	79.240.000,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	79.240.000,00
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		19.810.000,00
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		39.620.000,00
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		9.905.000,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	-			100 %	2.985.450.000,00						-	2.985.450.000,00
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	-			100 Persen	2.985.450.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	2.985.450.000,00
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media													
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	2.377.272.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		2.377.272.000,00
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	118.863.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		118.863.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					0 Laporan	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		0,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				30 Permohonan	79.241.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		79.241.000,00	
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Persentase	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		10.000.000,00	
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	9.905.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		9.905.000,00	
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	59.431.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		59.431.000,00	
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	99.052.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		99.052.000,00		
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik															
							Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	3.961.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		3.961.000,00		
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten															
							Jumlah Konten Informasi Publik				5 Konten	188.105.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		188.105.000,00		
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik															
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				3 Orang	39.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		39.620.000,00		
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1.535.307.000,00						-	1.628.768.000,00		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola	-			100 Persen	128.768.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	128.768.000,00		
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				5 Dokumen	128.768.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		128.768.000,00		
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	-			90 Persen	1.406.539.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	1.500.000.000,00		
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional															
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				2 Aplikasi	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00		
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE															
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	79.241.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		100.000.000,00		
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				18 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		100.000.000,00		
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo													
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE													
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	98.246.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		100.000.000,00
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah													
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				0 Laporan	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan													
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	99.052.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0 Laporan	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		0,00
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet													
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				54 Perangkat Daerah	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		500.000.000,00
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah													
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		250.000.000,00
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas													
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		150.000.000,00
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi													
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
												307.060.000,00							307.060.000,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	-			100 %	307.060.000,00						-	307.060.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-			100 Persen	307.060.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	307.060.000,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				3 Orang	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		50.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	57.060.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		57.060.000,00	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	-			100 %	348.663.000,00							-	546.768.000,00
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	-			100 Persen	245.000.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	393.105.000,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		198.105.000,00	
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		35.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah				
1	2	21	02	2.01	0007	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					10 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		150.000.000,00		
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					1 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		10.000.000,00		
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	-			100 Persen	103.663.000,00			-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir	-	153.663.000,00		
						Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					1 Kegiatan	103.663.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	OPD Indragiri Hilir		153.663.000,00		
J U M L A H												10.996.740.000,00									11.348.686.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 disertai indikator kinerja, target capaian kinerja dan pagu indikatifnya. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tertuang pada tabel berikut:

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	5.820.260.000,00
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100 Persen	69.335.000,00
2	16	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Dokumen	39.620.000,00
2	16	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	4 Laporan	19.810.000,00
2	16	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Laporan	9.905.000,00
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar		100 Persen	4.668.688.000,00
2	16	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	30 Orang/bulan	4.665.363.000,00
2	16	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	355.000,00
2	16	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	2.970.000,00
2	16	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset dan barang milik daerah (BMD) pada pengelola yang terpelihara		100 Persen	7.526.000,00
2	16	01	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	7.526.000,00
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi dan aparatur yang berkinerja baik		100 Persen	29.715.000,00
2	16	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	30 Paket	9.905.000,00
2	16	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Orang	19.810.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6						
2	16	01	2.06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		100 Persen	291.211.000,00
2	16	01	2.06	0001			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	3.961.000,00
2	16	01	2.06	0002			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket	99.052.000,00
2	16	01	2.06	0003			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	9.905.000,00
2	16	01	2.06	0004			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Paket	29.715.000,00
2	16	01	2.06	0005			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Paket	19.810.000,00
2	16	01	2.06	0006			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	250 Dokumen	9.905.000,00
2	16	01	2.06	0009			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	75 Laporan	118.863.000,00
2	16	01	2.07				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah		100 Persen	316.966.000,00
2	16	01	2.07	0001			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	4 Unit	178.294.000,00
2	16	01	2.07	0002			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	99.052.000,00
2	16	01	2.07	0009			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	39.620.000,00
2	16	01	2.08				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor		100 Persen	357.579.000,00
2	16	01	2.08	0001			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	989.000,00
2	16	01	2.08	0002			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Laporan	59.431.000,00
2	16	01	2.08	0004			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	297.159.000,00
2	16	01	2.09				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	79.240.000,00
2	16	01	2.09	0001			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Unit	9.905.000,00
2	16	01	2.09	0002			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	19.810.000,00
2	16	01	2.09	0009			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Unit	39.620.000,00
2	16	01	2.09	0011			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Unit	9.905.000,00
2	16	02					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi		100 %	2.985.450.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan		100 Persen	2.985.450.000,00
2	16	02	2.01	0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	2.377.272.000,00
2	16	02	2.01	0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Komunitas	118.863.000,00
2	16	02	2.01	0016	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	0 Laporan	0,00
2	16	02	2.01	0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	30 Permohonan	79.241.000,00
2	16	02	2.01	0018	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persentase	10.000.000,00
2	16	02	2.01	0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Rekomendasi	9.905.000,00
2	16	02	2.01	0020	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 Persentase	59.431.000,00
2	16	02	2.01	0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Media	99.052.000,00
2	16	02	2.01	0022	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	3.961.000,00
2	16	02	2.01	0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	5 Konten	188.105.000,00
2	16	02	2.01	0024	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Orang	39.620.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-		-	1.535.307.000,00
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola		100 Persen	128.768.000,00
2	16	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	5 Dokumen	128.768.000,00
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi		90 Persen	1.406.539.000,00
2	16	03	2.02	0013	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	2 Aplikasi	50.000.000,00
2	16	03	2.02	0019	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	79.241.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6
2	16	03	2.02	0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	18 Perangkat Daerah	100.000.000,00
2	16	03	2.02	0025	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Layanan	20.000.000,00
2	16	03	2.02	0026	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
2	16	03	2.02	0032	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Aplikasi	98.246.000,00
2	16	03	2.02	0033	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	0 Laporan	0,00
2	16	03	2.02	0034	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Aplikasi	99.052.000,00
2	16	03	2.02	0035	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	0 Laporan	0,00
2	16	03	2.02	0036	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	54 Perangkat Daerah	500.000.000,00
2	16	03	2.02	0037	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	250.000.000,00
2	16	03	2.02	0038	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	150.000.000,00
2	16	03	2.02	0039	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu		100 %	307.060.000,00
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia		100 Persen	307.060.000,00
2	20	02	2.01	0017	Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 %	50.000.000,00
2	20	02	2.01	0018	Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 %	50.000.000,00
2	20	02	2.01	0019	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 %	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6				
2	20	02	2.01	0020	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	3 Orang	50.000.000,00
2	20	02	2.01	0021	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	100 %	50.000.000,00
2	20	02	2.01	0022	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	57.060.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah		100 %	348.663.000,00
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian		100 Persen	245.000.000,00
2	21	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	110.000.000,00
2	21	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Laporan	35.000.000,00
2	21	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	10 Perangkat Daerah	100.000.000,00
2	21	02	2.01	0008	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Dokumen	0,00
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi		100 Persen	103.663.000,00
2	21	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	1 Kegiatan	103.663.000,00
JUMLAH									10.996.740.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang dijadikan prioritas dan indikasi perumusan atau penyusunan kegiatan program Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Government*

sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

Penyusunan Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Pada Renja-PD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah dijabarkan beberapa isu-isu penting atau strategis perihal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, oleh karenanya diharapkan rencana yang telah disusun atau dirumuskan ini dapat mengatasi atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, dan dengan spirit perubahan kearah yang lebih baik, pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian

dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera terealisasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2026 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2026.

Tembilahan, Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126-199802 1 001